

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Bisnis Indonesia

Wilayah Berita : Kabupaten Jepara

Halaman 13

## BUMDes akan Dilibatkan untuk Penerimaan PBB P2

JEPARA- Sepanjang tahun 2017, realisasi PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) yang masuk ke APBD mencapai Rp 21 miliar. Jumlah itu setara 105 persen dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pos tersebut. Awalnya untuk PBB P2 hanya diproyeksikan mendapatkan sebesar Rp 20 miliar.

Jumlah Rp 21 miliar ini kemudian ditetapkan sebagai target penerimaan PBB P2 sepanjang tahun 2018. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 tahun 2018 telah didistribusikan ke kecamatan sejak 2 Januari.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara, Anwar Haryono, menyatakan, target ini sudah tercantum dalam APBD 2018.

Untuk PAD 2017 lalu, Anwar Haryono menyatakan tidak semua desa di Kabupaten Jepara berhasil mencapai lunas PBB P2. Dari 195 desa/kelurahan hanya 152 yang dilaporkan bisa melunasi PBB P2. Sedangkan untuk tahun 2018 ini, sampai Senin (8/1), sudah ada 6 desa yang berhasil melunasi PBB P2-nya untuk tahun 2018.

"Desa yang belum lunas PBB P2 tahun 2017, akan tetap ditagih karena menjadi pajak terutang para wajib pajak. Jadi tidak diputihkan," ujar Anwar Haryono, Senin (8/1).

Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam membayar PBB P2, Pemkab Jepara pada 2018 akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa-desa. Transaksi pembayaran melalui payment point ini, Senin (8/1) telah diawali oleh BUMDes Desa Kecapi, Tahunan. Selanjutnya desa-desa lain diarahkan untuk mengikuti.

Pelayanan di masing-masing BUMDes diharapkan bisa menjadi payment point PBB P2 alternatif bagi wajib pajak. Selama ini untuk PBB P2 masyarakat di Jepara memang hanya bisa melakukannya di Bank Jawa Tengah. Penempatan payment point PBB P2 di BUMDes Kecapi ditetapkan karena unit usaha ini sudah mengikat kerja sama dengan Bank Jateng. Rekening penerimaan PBB P2 Pemkab Jepara memang berada di bank ini.

"Untuk selanjutnya kami akan mendorong BUMDes desa lain untuk bisa menjalin kerjasama dengan BUMDes di Kecapi ini ini. Sehingga dengan begitu akan memberi kemudahan bagi masyarakat yang akan membayar pajak mereka," tegas Anwar Haryono. ■